ABSTRAK

Kharis Hadiyanto, 126102211049, ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI TAKUT ZINA (Studi Komparasi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg dan Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sel), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Dr. Mashuri, M.H.I.

Kata Kunci: *Maslahah Mursalah* , pertimbangan hakim, perizinan poligami, suami takut zina.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian alasan pemohon dalam mengajukan izin poligami, jika dilihat dari asas pernikahan yaitu asas monogami bahwasanya seorang suami hanya untuk seorang isteri dan sebaliknya, sedangkan poligami bukanlah suatu kebetulan dan bukan hal yang mendasar, melainkan suatu hal yang keluarbiasaan dan ketidakwajaran yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, hal ini yang menjadikan pemerintah untuk membuat sebuah peraturan yang berisi syarat-syarat untuk melakukan poligami, sehingga seseorang yang ingin melakukan poligami harus memiliki alasan yang logis, dalam Putusan Nomor 47Pdt.G/2024/Pa.Jbg dan Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/Pa.Sel, alasan pemohon melakukan poligami adalah untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh norma agama (zina), sedangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, tidak ada alasan yang sama seperti yang dijabarkan oleh pemohon dalam putusan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami karena suami takut zina pada Putusan Nomor 47/Pt.G/2024/Pa.Jbg perspektif hukum positif, 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami karena suami takut zina pada Putusan Nomor 351/Pdt.g/2024/Pa.Sel perspektif hukum positif, 3) Bagaimana analisis maslahah mursalah terhadap persamaaan dan perbedaan pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami karena suami takut zina pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/Pa.Jbg dan Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/Pa.Sel.

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengelola bahan penelitian dengan mengumpulkan teori-teori dalam buku dan karangan ilmiah lainya, yang ada relevansinya dalam rumusan masalah. Dilihat dari rumusan masalah yang ada, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik

komparatif yang membandingkan antara Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg dan Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sel.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/Pa.Jbg cukup mendasar, karena kesesuaian fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwasanya alasan pokok pemohon mengajukan izin poligami karena termohon sakit, hal ini sesuai dengan syaratsyarat poligami yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2) Berbeda dengan pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg, pada Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/Pa.Sel majelis hakim beranggapan bahwa alasan pemohon tidak sesuai dengan syarat yang ada dalam ketentuan perundang-undangan, dalam putusan tersebut pemohon beralasan untuk menghindari fitnah dan khawatir berbuat zina. Meskipun tidak ada kesesuaian syarat alternatif dalam permohonan pemohon, majelis hakim menemukan sebuah fakta dengan melihat dan mendengar secara langsung, bahwa pemohon dan calon isteri kedua pemohon telah melangsungkan nikah secara agama (sirri), sehingga majelis hakim perlu mempertimbangkan problem tersebut dari segi maslahah, karena kasus ini sudah masuk dalam kategori isbat nikah poligami. 3) Jika dianalisis menggunakan teori maslahah mursalah, persamaan pada kedua putusan tersebut terletak pada pertimbangan majelis hakim yang mempertimbangkan untuk menghilangkan kemudharatan dan menjalankan kemaslahatan karena sudah masuk ranah dharuri, meskipun jika dilihat dari kondisi isteri pemohon yang ada dalam kedua putusan tersebut, keduanya memiliki sebuah perbedaan, dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg kondisi isteri pemohon dalam keadaan sakit, sedangkan pada Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/Pa.Sel, isteri pemohon masih dalam keadaan sehat wal afiat, hal ini membuat kebutuhan pemohon terpenuhi secara al-maslahih al-kahmsah, sehingga kondisi isteri pemohon bukan dalam keadaan dharuri melainkan dalam keadaan tahsiniyah.

ABSTRACT

Kharis Hadiyanto, 126102211049, ANALYSIS OF MASLAHAH MURSALAH ON THE CONSIDERATION OF THE JUDGE IN GIVING POLYGAMY PERMISSION BECAUSE THE HUSBAND FEARS ZINA (Comparative Study of Decision Number 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg and Decision Number 351/Pdt.G/2024/PA.Sel), Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Legal Sciences, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Supervisor: Dr. Mashuri, M.H.I.

Keywords: Maslahah Mursalah, judge's consideration, polygamy license, husband's fear of adultery.

This research is motivated by the incompatibility of the applicant's reasons for applying for a polygamy permit, when viewed from the principle of marriage, namely the principle of monogamy that a husband is only for one wife and vice versa, while polygamy is not a coincidence and not a basic thing, but rather an unusual and unnatural thing that can only be done in an emergency, this is what makes the government to make a regulation containing the conditions for polygamy, so that someone who wants to commit polygamy must have a logical reason, in Decision Number 47Pdt.G/2024/Pa.Jbg and Decision Number 351/Pdt.G/2024/Pa.Sel, the applicant's reason for committing polygamy is to avoid acts prohibited by religious norms (adultery), while in Article 4 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 41 of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of the Marriage Law, and Article 57 of the Compilation of Islamic Law, there is no similar reason as described by the applicant in these decisions.

The problem formulations in this study are: 1) How is the judge's consideration in granting polygamy permission because the husband is afraid of adultery in Decision Number 47/Pt.G/2024/Pa.Jbg from a positive law perspective, 2) How is the judge's consideration in granting polygamy permission because the husband is afraid of adultery in Decision Number 351/Pdt.g/2024/Pa.Sel from the perspective of positive law, 3) How is the maslahah mursalah analysis of the similarities and differences in the judge's consideration in granting polygamy permission because the husband is afraid of adultery in Decision Number 47/Pdt.G/2024/Pa.Jbg and Decision Number 351/Pdt.G/2024/Pa.Sel.

This research is classified as a type of library research that uses the method of collecting library data, reading, recording and managing research materials by collecting theories in books and other scientific essays, which have relevance in the formulation of problems. Judging from the formulation of the existing problem, this study also uses a normative juridical approach by examining laws that are conceptualized as norms or rules that apply in society, and become a reference for everyone's behavior. The data analysis technique in this study uses a comparative

technique that compares Decision Number 47/Pdt.G/2024/PA. Jbg and Decision Number 351/Pdt.G/2024/PA. Cell.

The results of this study show that: 1) the consideration of the panel of judges in Decision Number 47/Pdt.G/2024/Pa.Jbg is quite basic, because of the suitability of the facts found in the trial that the main reason for the applicant to apply for a polygamy permit is because the respondent is sick, this is in accordance with the conditions of polygamy in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. 2) In contrast to the consideration of the panel of judges in Decision Number 47/Pdt.G/2024/PA. Jbg, in Decision Number 351/Pdt.G/2024/Pa.Cell, the panel of judges considered that the applicant's reason was not in accordance with the conditions contained in the provisions of the law, in the decision the applicant was justified to avoid defamation and was worried about committing adultery. Although there was no suitability of alternative conditions in the applicant's application, the panel of judges found a fact by seeing and hearing directly, that the applicant and the applicant's two future wives had held a religious marriage (sirri), so the panel of judges needed to consider the problem in terms of *maslahah*, because this case has been included in the category of polygamous marriage isbat. 3) If analyzed using *the theory of maslahah mursalah,* the similarity in the two decisions lies in the consideration of the panel of judges who consider eliminating harm and exercising benefits because it has entered the realm *of dharuri*, although when viewed from the condition of the applicant's wife in the two decisions, both have a difference, in Decision Number 47/Pdt.G/2024/PA. In terms of the condition of the applicant's wife in a state of illness, while in Decision Number 351/Pdt.G/2024/Pa.Sel, the applicant's wife is still in good health *wal afiat,* this makes the applicant's needs met in *a way that is al-maslahih al-kahmsah*, so that the condition of the applicant's wife is not in *a state of dharuri* but in a *state of tahsiniyah.*

الملخص

خريس هاديانتو، ١٢٦١٠٢٢١١٠٤٩، تحليل *مصلحة مرصالح* حول اعتبارات القضاة في منح تصاريح تعدد الزوجات لأن الأزواج يخافون من الزنا (دراسة مقارنة للقرار رقم PA. Jbg/٢٠٢٤/Pdt.G/٤٧ والقرار رقم PA/٢٠٢٤/Pdt.G/٣٥١. خلية) ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ،كلية الشريعة والقانون ، جامعة إنجلترا سيد علي رحمة الله تولونغاغونغ ، ٢٠٢٥ ، المشرف: د. ماشوري ، م.هـ.ي.

الكلمات المفتاحية: *مصالحة مرصالح* ، اعتبار القاضي، ترخيص تعدد الزوجات، الزوج خائف من الزنا.

ويستند هذا البحث إلى عدم توافق أسباب مقدم الطلب في التقدم بطلب تصريح تعدد الزوجات، عند النظر إليه من مبدأ الزواج، وهو مبدأ الزواج الأحادي بأن الزوج للزوجة فقط والعكس صحيح، في حين أن تعدد الزوجات ليس مصادفة وليس شيئا أساسيا، بل شيء غير عادي وغير طبيعي لا يمكن القيام به إلا في حالات الطوارئ، وهذا ما يدفع الحكومة إلى وضع نظام يحتوي على الشروط في ارتكاب تعدد الزوجات، بحيث يجب أن يكون لدى الشخص الذي يرغب في ارتكاب تعدد الزوجات سبب منطقي، في القرار رقم Pa.Jbg/٢٠٢٤/Pdt.G٤٧ والقرار رقم Pa.Sel/٢٠٢٤/Pdt.G/٣٥١، فإن سبب تعدد الزوجات هو تجنب الأفعال التي تحظرها الأعراف الدينية (الزنا)، بينما في المادة ٤ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج، المادة ٤١ من اللائحة الحكومية رقم ٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تطبيق قانون الزواج، والمادة ٥٧ من تجميع الشريعة الإسلامية، لا يوجد سبب مماثل كما وصفه مقدم الالتماس في الحكم.

صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: 1) كيف يأخذ القضاة في الاعتبار في منح تصاريح تعدد الزوجات لأن الزوج يخاف من الزنا في القرار رقم Pa.Jbg/٢٠٢٤/Pt.G/٤٧ من منظور قانوني إيجابي، 2) كيف يأخذ القضاة في الاعتبار في منح تصاريح تعدد الزوجات لأن الأزواج يخافون من الزنا في القرار رقم Pa. Sel/٢٠٢٤/Pdt.g/٣٥١ من منظور قانوني إيجابي، 3) كيف يتم تحليل مصلحة مرصالح حول أوجه التشابه والاختلاف في اعتبارات القضاة في منح تصاريح تعدد الزوجات لأن الأزواج يخافون من الزنا في القرار رقم Pa.Jbg/٢٠٢٤/Pdt.G/٤٧ والقرار رقم Pa.Sel/٢٠٢٤/Pdt.G/٣٥١.

يصنف هذا البحث على أنه نوع من الأبحاث المكتبية التي تستخدم طريقة جمع البيانات المكتبية وقراءة وتسجيل وإدارة المواد البحثية من خلال جمع النظريات في الكتب والمقالات العلمية الأخرى ، والتي لها صلة بصياغة المشكلات. انطلاقا من صياغة المشكلة الحالية ، تستخدم هذه الدراسة أيضا نهجا قانونيا معياريا من خلال فحص القوانين التي يتم تصورها على أنها قواعد أو قواعد تنطبق في المجتمع ، وتصبح مرجعا لسلوك الجميع. تستخدم تقنية تحليل البيانات في هذه الدراسة تقنية مقارنة تقارن القرار رقم PA. Jbg/٢٠٢٤/Pdt.G/٤٧ والقرار رقم PA/٢٠٢٤/Pdt.G/٣٥١. خلية.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن: 1) نظر هيئة القضاة في القرار رقم Pa.Jbg/٢٠٢٤/Pdt.G/٤٧ أساسي للغاية، نظرا لملاءمة الوقائع التي تم العثور عليها في المحاكمة بأن السبب الرئيسي لطلب طلب تعدد الزوجات هو أن المدعى عليه مريض، وهذا يتفق مع شروط تعدد الزوجات في القانون رقم 1 لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج. 2) على النقيض من نظر هيئة القضاة في القرار رقم PA. Jbg/٢٠٢٤/Pdt.G/٤٧ ، في القرار رقم ٣٥١ / Pdt.G / ٢٠٢٤ / Pa.Cell ، اعتبرت لجنة القضاة أن سبب مقدم الطلب لا يتفق مع الشروط الواردة في أحكام القانون ، في القرار كان مقدم الطلب مبررا لتجنب التشهير وكان قلقا من ارتكاب الزنا. وعلى الرغم من عدم ملاءمة شروط بديلة في طلب مقدم الطلب، فقد وجدت هيئة القضاة من خلال الرؤية والاستماع مباشرة إلى حقيقة مفادها أن مقدم الطلب وزوجتي مقدم الطلب المستقبليتين قد عقدتا زواجا دينيا، ولذلك كان على هيئة القضاة أن تنظر في المشكلة من حيث المصلاحة، لأن هذه القضية أدرجت في فئة تعدد الزوجات في عصبات. 3) إذا تم تحليله باستخدام نظرية مصالحة مرصالح ، فإن التشابه في القرارين يكمن في نظر لجنة القضاة التي تنظر في القضاء على الضرر وممارسة المزايا لأنها دخلت نطاق الداروري ، على الرغم من أنه عند النظر إلى حالة زوجة مقدم الطلب في القرارين ، فإن كلاهما يختلفان ، في القرار رقم ٤٧ / Pdt.G / ٢٠٢٤ / PA. أما حالة زوجة مقدم الطلب في حالة مرضية ، بينما في القرار رقم ٣٥١ / Pdt.G ٢٠٢٤ / Pa.Sel ، لا تزال زوجة مقدم الطلب في حالة جيدة من العفيات ، وهذا يجعل احتياجات مقدم الطلب تلبي بطريقة هي المصالح الكهمسة ، بحيث لا تكون حالة زوجة مقدم الطلب في حالة الظهري بل في حالة تحسينية.